BAB II

TINJAUAN BUKU

EVALUASI RANAH MATERI CIVIC EDUCATION DALAM BUKU *PENDIDIKAN KEWARGAAN: DEMOKRASI, HAM DAN MASYARAKAT MADANI,* IAIN JAKARTA PRESS, 2000

GENERAL REVIEW

Ditinjau dari kebutuhan literatur yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam era reformasi saat ini buku ini membawa pesan yang diperlukan mahasiswa dan pembaca umum lainnya. Pembaca akan mendapatkan hal-hal baru yang dapat membantu memahami perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dinegeri ini. Akan tetapi secara umum pembahasan masing-masing Bab dalam buku ini kurang sistematis. Ada beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian. *Pertama,* timbul kesan kuat adanya semacam pemaksaan dilakukan oleh tim agar semua masukan yang diperoleh dari workshop diakomodasi. *Kedua,* proses *editing* yang dilakukan kurang dilandasi oleh pemahaman yang mendasar dan menyeluruh berkenaan dengan disiplin ilmu yang menjadi latar belakang munculnya bab-bab tersebut. *Ketiga,* pada sebagian bab pendalaman materi tidak dilakukan secara sistematis.

Kesan yang segera muncul adalah buku ini ditulis dengan tingkat ketergesaan yang tinggi demi mengejar target pelaksanaan proyek. Tekanan waktu dan pengalaman editor bisa menjadi penyebab lain. Di samping itu, kekurangan tenaga ahli sebagai tim pengawas penulisan buku bisa pula menjadi penyebab yang paling fatal. Kekurangan di atas berpotensi mengurangi kehandalan literatur sebagai pedoman dasar dalam proses pembentukan sikap yang diharapkan dari pendidikan kewargaan ini. Sebagai misal, pembahasan tentang negara digabung dengan konsep kewarganegaraan yang lebih banyak mengetengahkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang tidak terfokus pada substansi konsep warganegara.

Tak ada sama sekali bab yang membicarakan tentang Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global. Bangsa Indonesia dikenal lebih suka tinggal di negeri sendiri dan kurang berminat tinggal di negeri orang kecuali segelintir warga. Bab tentang militer, masyarakat sipil, demokrasi, dan ham menarik. Namun pada umumnya kurang terfokus dan cenderung mengambang. Tak ada sama sekali pembahasan tentang sistem dan proses politik di Indonesia. Tiap bab kurang dilengkapi dengan contoh-contoh kongkrit yang dapat membantu mahasiswa menginternalisasikan konsep-konsep dasar dari buku ini. Sebagai

contoh isu pelanggaran HAM, isu tentang kesetaraan gender memerlukan contoh kongkrit demikian pula bab-bab lainnya.

THEORETICAL OVERVIEW

Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang dekade akhir abad ke 20 mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan kewargaan diberbagai negara sebagaimana dikupas Cogan dan Morris. Di Amerika untuk pertama kalinya standar kurikulum nasional pendidikan sipil disusun pada tahun 1994. Dewan Eropa juga memprakarsai proyek demokratisasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewargaan. Kecenderungan serupa juga berlangsung di negara-negara Australia, Canada, Jepang dan negara Asia lainnya.[2]

Pesatnya perkembangan tentang kebijakan pendidikan khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan kewargaan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan masyarakat di tingkat lokal dan global menuntut bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan adaptasi kembali terhadap tuntutan lingkungan yang terus bergerak dan berubah cepat. Penelitian yang dilakukan para ahli pendidikan dari berbagai belahan dunia menghasilkan temuan-temuan baru yang menarik untuk melakukan kajian ulang terhadap prinsip dan tujuan pendidikan kewargaan di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut juga memberikan gambaran yang beragam dalam operasionalisasi pendidikan kewargaan di masing-masing negara. Di Australia, misalnya, program pendidikan kewargaan yang dicanangkan ialah *discovering democracy* (pendidikan tentang masyarakat, sejarah, dan geografi) yang masuk menjadi matapelajaran wajib di sekolah-sekolah. Sementara Hongkong menerapkan pendidikan kewargaan sebagai matapelajaran pilihan dalam bentuk ekstra-kurikuler, papan display, dan diskusi di tingkat sekolah.[3] Jepang menerapkan pendidikan moral atau agama dan ilmu sosial sebagai matapelajaran wajib di sekolah-sekolah Jepang.[4] Taiwan juga memberlakukan matapelajaran sejarah, politik, ekonomi, dan masyarakat serta kewarganegaraan dan moralitas sebagai matapelajaran wajib di sekolah-sekolah. Sementara Thailand mengajarkan Budhisme di sekolah-sekolah sebagai matapelajaran wajib.[5] Sedangkan Amerika mengatur pendidikan kewargaan

---

[2] John J. Cogan and Paul Morris, *The Development of Civics Values: An Overview, International Journal of Educational Research*, www.elsevier.com/locate/ijedures, hal. 1-2

[3] Di Hongkong, pendidikan kewargaan dimasukkan dalam matapelajaran *Tradisi Cina*.

[4] Di sekolah-sekolah Jepang ada guru khusus yang mengajarkan pendidikan kewargaan, dan disediakan buku teks yang pada umumnya berisikan tentang sejarah nasional, struktur, dan proses pemerintahan.

[5] Di Taiwan, bentuk pendidikan kewargaan adalah matapelajaran *Kajian Budhisme, Memahami Taiwan*, dan *Kewarganegaraan dan Moralitas*. Sementara di Thailand, bentuk pendidikan kewargaan ialah dimasukkan dalam matapelajaran *Kajian Budhisme*.

dalam kurikulum ilmu sosial selama satu tahun dan diserahkan pelaksanaannya kepada negara-negara bagian.[6]

Hasil-hasil penelitian tersebut secara umum mengarahkan bangsa-bangsa untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa bersangkutan. Morris dan Cogan juga membedakan tekanan yang diberikan oleh masing-masing negara.[7] Di Australia, materi yang diajarkan dalam pendidikan kewargaan ialah : (1) Prinsip, proses, dan nilai demokrasi; (2) Proses pemerintahan Australia; dan (3) Keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat. Di Hongkong, materi yang ditekankan ialah nilai-nilai Cina, keluarga, harmoni sosial, tanggung jawab moral, mesin politik RRC, dan lain-lain. Sementara di Jepang, pendidikan kewargaan menekankan pada dua aspek, yaitu : (1) Struktur masyarakat, pemerintahan nasional, dan ekonomi; dan (2) Sejarah nasional dan masyarakat demokratis. Di Taiwan, pendidikan kewargaan ditekankan pada : Pengetahuan kewarganegaraan (disusun berdasarkan psikologi, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum, dan budaya); perilaku moral (kohesi sosial, identitas nasional, dan demokrasi); dan menghargai budaya lain. Di Thailand, materi yang ditanamkan ialah : (1) Menyiapkan pemuda menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik; (2) Menghormati orang lain dan ajaran Budha; dan (3) Nilai-nilai demokrasi dengan raja sebagai kepala negara. Sedangkan di Amerika, materi yang diajarkan dalam pendidikan kewargaan ialah : (1) Menekankan warga yang produktif dan sadar haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia; (2) Nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional; dan (3) Mampu mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling tergantung. Secara umum, negara-negara Asia menekankan aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Sementara Amerika dan Australia menekankan pentingnya hak dan tanggung-jawab individu, serta sistem dan proses demokrasi, hak asai manusia, dan ekonomi pasar.

CRITICAL REVIEW

Buku *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan literatur kontemporer tentang pendidikan kewargaan di tengah proses reformasi yang sedang berlangsung saat ini. Sekalipun kemunculan karya ini tepat pada waktunya namun substansi dari buku tersebut mengandung beberapa kelemahan yang

---

[6] Di Amerika, pendidikan kewargaan dimasukkan dalam matapelajaran *Kewarganegaraan dan Pemerintahan.*

perlu mendapat catatan di beberapa tempat. Berikut ini beberapa ulasan evaluatif atas materi yang terkandung dalam buku tersebut.

Bab I tentang Identitas Nasional

Bab ini yang disusun berdasarkan logika sosiologis sesungguhnya berhasil membuka wawasan baru tentang bangsa Indonesia dalam kerangka sosiologis sebagaimana tersirat dalam bahasan awal dan diperkuat oleh literatur yang menopang tulisan tersebut. Namun, menjelaskan identitas sebuah bangsa tanpa lebih dahulu menyebutkan asal-usul sebuah bangsa sesungguhnya mengurangi bobot pemaknaan dari identitas tersebut. Sebab faktor historis inilah yang sesungguhnya yang seringkali menjadi sumber pembentukan dan pemeliharaan nilai-nilai paling mendasar dari sebuah bangsa.

Sementara itu, paparan tentang ideologi yang sedemikian penting ternyata juga lepas dari konteks historis. Ideologi dituliskan sebagai pengertian-pengertian tanpa menempatkannya secara proporsional pada aspek sistem politik Sajian ini menjadi kering karena ideologi dibahas sebagai gagasan abstrak yang berada di awang-awang.

Lemahnya kerangka teori sebagai penyangga kupasan tentang identitas nasional ini kemudian diperburuk dengan hanya menjelaskan ideologi pancasila. Penambahan bahasa integrasi seperti hanya sekedar pelengkap yang kurang terfokus pada persoalan dasar.

Perlu ditambahkan contoh-contoh tentang realitas keragaman sosial-budaya Indonesia, misalnya, penyebutan komunitas-komunitas utama yang berbasis agama atau yamg lain untuk menopang konsep heterogenitas masyarakat Indonesia.

Bab II tentang Negara dan Kewarganegaraan

Bab ini juga mengandung beberapa kelemahan pokok. Paparan teoritis negara sangat bagus karena mencakup berbagai pendekatan tapi sangat berorientasi pada disiplin ilmu hukum. Oleh karena itu, cakupan tersebut menjadi tidak cukup bahkan ketinggalan zaman, karena fakta tentang negara kontemporer mengalami tantangan serius sebagai akibat dari perubahan teknologi informasi dan komunikasi belakangan ini. Negara tak lagi dapat dipahami sebagai entitas yang otonom tapi harus dilihat dalam perspektif rangkaian entitas yang berhubungan satu sama lain dalam situasi yang sangat

---

[7] Morris and Cogan, *A Comparative Overview: Civic Education across six societies*, www.elsevier.com/locate/ijedures.

kompetitif dalam sebuah kawasan global yang sangat beragam, dinamis, virtual dan kejam.

Bahasan tentang kewarganegaraan terlalu mendatail namun pada akhirnya lepas dari konteks demokrasi yang diharapkan penyusun. Walaupun strategi mewujudkan warganegara dalam perspektif demokrasi ditulis cukup bagus namun diskusi tentang hak dan kewajiban negara dan warganegara kurang dibahas lebih lanjut. Akibatnya pembaca akan kesulitan memahami apa sesungguhnya kewajiban negara terhadap warganegara. Kelemahan ini merupakan lobang hitam yang berpotensi menghalangi apresiasi pembaca tentang hubungan antara negara dan warganegara secara lebih komprehensif dan berpedoman pada nilai demokrasi.

Bab 3 tentang Konstitusi

Bab ini terlalu pendek dan tak ada pembahasan tentang konstitusi dalam konteks perubahan politik saat ini. Bahasan ini kering dari nuansa perubahan politik yang sedemikian dinamis saat ini. Tak ada diskusi tentang distribusi kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan hak-hak individu serta kelompok dalam perspektif demokrasi. Hanya ada secuil bahasan tentang perubahan undang-undang namun kurang mampu menumbuhkan motivasi tentang apa dan bagaimana perubahan konstitusi serta implikasinya terhadap sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi. Bab ini perlu dielaborasi kembali sehingga dapat membantu memahami makna strategis dari konstitusi. Karena negara demokrasi baru mau tak mau harus bekerja berdasarkan konstitusi yang disepakati oleh semakin banyak pihak.

Bab 4 tentang Pemerintahan dan Hubungan Sipil – Militer

Bab ini disusun berdasarkan hasil bacaan yang kurang terpadu. Pokok-pokok bahasan seperti eksekutif, yudikatif, legislatif, dan *checks and balances* jauh lebih tepat dibahas pada Bab Konstitusi. Muncul kesan editor kurang memahami alur pemikiran yang berkembang dalam studi militer dan demokrasi. Bahasan tentang hubungan sipil-militer lebih banyak mendeskripsikan model-model pemerintahan militer yang sudah tak lagi menjadi kajian utama studi tentang militer di negara demokrasi baru. Kajian militer berhenti pada deskripsi tentang mengapa militer melakukan intervensi? Terdapat ruang hampa besar antara realitas yang diungkap dalam bab ini dengan realitas hubungan sipil-militer dewasa ini. Diskusi tentang militer dinegara demokrasi baru telah jauh melampaui apa yang diungkap dalam bab ini. Dewasa ini kajian tentang militer lebih terfokus pada hubungan antara militer dengan pemerintahan sipil, sistem

partai, dan sistem ekonomi dalam era transisi. Juga perlu dicatat bahwa isu kekerasan yang bertalian dengan perilaku aparat militer kurang mendapat perhatian dalam sub-bab ini

Bab 5 tentang Agama dan Negara

Bab ini kurang mencerminkan pemahaman editor tentang posisi gejala ini dalam sistem politik. Sepanjang Orde Baru hubungan Agama dan Negara menjadi salah satu pilar utama kebijakan politik Suharto. Deskripsi yang terlalu singkat tentang aspek historis ini membuat pemikiran tentang hubungan agama dan negara menurut buku ini menjadi kurang bermakna. Di samping itu, karena buku ini diarahkan untuk membekali mahasiswa perguruan tinggi Islam, maka diperlukan elaborasi tentang konsep-konsep dasar Islam tentang negara dan bandingkan dengan gagasan Barat tentang negara.

Bab 6 tentang Masyarakat Sipil

Bab ini relatif cukup jelas dan mampu mengangkat tema-tema utama dalam kajian masyarakat sipil. Namun perlu ditambahkan tentang isu standar ganda. Mengapa negara Barat menuntut negara-negara berkembang membangun demokrasi namun menentang tumbuhnya demokrasi di negara "Islam" seperti Aljazair? Isu tentang kesetaraan gender barangkali menjadi penting dalam bab ini sejalan dengan semakin kerasnya tuntutan kesetaraan gender dalam agenda publik masyarakat sipil.

Bab 7 tentang Demokrasi

Dalam bab ini ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Penelusuran literatur demokrasi belum menyentuh hal-hal yang mendasar tentang demokrasi. Bahasan demokrasi perlu menjelaskan aspek substansial (makna) dan prosedural (proses). Kedua aspek ini memerlukan deskripsi lebih rinci tentang hubungan eksekutif – legislatif dalam perspektif sistem pemerintahan, sistem partai, dan sistem pemilihan. Dewasa ini kajian tentang demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang peranan LSM, media massa, dan kekuatan asing serta kemakmuran ekonomi dalam era transisi.

Bab 8 tentang Hak Asasi Manusia

Bab ini terlalu menekankan aspek konseptual dari hak asasi manusia, namun kurang memberikan ilustrasi tentang pratek pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Perlu diberikan contoh-contoh kongkrit tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan

bagaimana sikap pemerintah asing tentang kasus pelanggaran HAM serta dampaknya sosial, politik, ekonomi terhadap masyarakat Indonesia.

CATATAN TAMBAHAN

Setidaknya, terkait dengan fenomena keterpurukan bangsa yang saat ini oleh krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan, ada delapan isu yang patut dikembangkan dan menjadi kebutuhan real bagi masyarakat untuk melakukan pendidikan kewargaan. Kedelapan isu tersebut ialah sebagai berikut :

1. Hancurnya Nilai-nilai Demokrasi dalam Masyarakat

   Melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada upaya penegakan hukum di negeri ini. Beberapa kelompok sosial yang lemah di negeri ini hampir merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan kelompok sosial lain yang lebih kuat. Hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan pudarnya ketaatan pada hukum menjadi sala satu persoalan serius yang mengancam keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Di samping itu, rendahnya kesadaran *representativeness* di kalangan masyarakat dan anggota parlemen juga mengakibatkan kesadaran sistemik-demokratis akhirnya kurang bisa berjalan secara optimal. Kuatnya hegemoni partai politik atas anggota parlemen semakin mendistorsi makna anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Kepentingan politik partai seringkali mengalahkan kepentingan masyarakat yang diwakili anggota parlemen di badan legislatif. Demikian juga halnya dengan kesadaran *representativeness* di tengah masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menggugat wakil rakyat yang ada di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat juga masih rendah. Masyarakat juga seakan berjalan sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya, sehingga seakan tidak ada koneksi antara wakil rakyat di parlemen dengan masyarakat yang diwakilinya.

2. Memudarnya Kehidupan Kewargaan dan Nilai-nilai Komunitas

   Pelanggaran atas hak-hak individual, penjarahan atas hak milik orang lain, dan penjarahan tanah adat secara sistematis oleh pihak pengusaha atau pemerintah merupakan kasus yang semakin banyak dijumpai di negeri ini. Di samping itu, ada juga problem mental yang sangat serius mengancam kepentingan bersama masyarakat, yaitu tanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Kesadaran yang masih rendah sebagai anggota warga seringkali menimbulkan berbagai macam perilaku sosial yang mengancam fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan raya, taman kota, telepon dan WC umum, serta berbagai fasilitas umum yang lain. Berbagai kasus kekecewaan

sosial di negeri ini seringkali juga berujung pada perusakan fasilitas-fasilitas umum, seperti penebangan pohon di sepanjang jalan (di beberapa kawasan di Jawa Timur dan Jawa Tengah) akibat kekecewaan warga setempat terhadap proses politik di tingkat pusat, perusakan fasilitas lalulintas di beberapa tempat akibat anarkhisme demonstrasi dan aksi massa, dan juga pembakaran kendaraan milik orang lain yang juga diakibatkan anarkhisme aksi massa. Kebersamaan sebagai anggota masyarakat semakin mengalami kemerosotan

3. Kemerosotan Nilai-nilai Toleransi dalam Masyarakat

   Uniformasi (penyeragaman) yang selama ini cenderung dilakukan rezim otoriter juga membawa akibat buruk pada harmonitas masyarakat yang plural, sehingga nilai-nilai lokal-tradisional termarginalisasi secara sistematis (sementara pada saat yang sama belum ditemukan nilai-nilai baru yang bisa mentransformasikan masyarakat yang bersatu dalam keberagaman). Pada saat kontrol negara mulai melemah, maka keberagaman sosial yang dahulu dimarginalisasikan akhirnya semakin menguat secara *chauvinistic,* sehingga mengancam harmoni dalam pluralitas masyarakat di negeri ini. Intoleransi juga semakin menggejala dalam konteks interaksi antar-agama, antar-daerah, antar-etnis, antar-partai politik, dan lain-lain. Berbagai kasus pertikaian etnis (seperti Madura-Dayak di Kalimantan), pertikaian agama (seperti Islam-Kristen di Maluku), pertikaian pendukung partai politik (seperti PDIP-PKB), dan berbagai macam pertikaian di negeri ini merupakan cermin bagi kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Kecenderungan untuk memaksakan kehendak suatu kelompok sosial tertentu juga semakin sering terjadi dalam transisi masyarakat menuju demokratisasi di negeri ini. *Sweeping* atas buku-buku berbau kiri, penculikan dan penganiayaan terhadap aktivis gerakan tertentu, dan juga perusakan berbagai fasilitas peribadatan dan pendidikan di Jawa Timur dan Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu semakin memperpanjang daftar hitam kemuraman wajah bangsa ini yang *'bhinneka tunggal ika'*.

4. Memudarnya Nilai-nilai Kejujuran, Kesopanan, dan Rasa Tolong-menolong

   Nilai-nilai kejujuran, kesopanan, sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong, dan ketundukan pada hukum seakan semakin menipis. Ikatan-ikatan sosial lama yang mengedepankan sikap kasih sayang terhadap sesama seakan berganti wajah dan mengalami proses dehumanisasi. Anggota masyarakat seakan menjadi individu-individu yang kaku dan *social-disembedded.* Maraknya tindakan asusila juga semakin dirasakan dalam transisi masyarakat saat ini. Perjudian, peredaran narkotika, perkelahian pelajar, pesta seks di tempat terbuka, dan sebagainya seakan menjadi

fenomena keseharian yang muncul di media massa yang pada akhirnya berakibat buruk pada upaya pendidikan generasi muda.

5. Melemahnya Nilai-nilai dalam Keluarga

   Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga merupakan akibat saling pengaruh antara faktor eksternal dan faktor internal keluarga, dan hal ini ditandai dengan melemahnya nilai tanggungjawab dalam keluarga, tidak terpenuhinya kebutuhan akan dukungan dan perlindungan terhadap anggota keluarga, serta luntunya moral dan kebersamaan dalam keluarga. Kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup keluarga (terutama terjadi di kalangan keluarga miskin dengan melupakan hak pendidikan anak) merupakan fenomena yang cukup menggejala di perkampungan-perkampungan kumuh di perkotaan-perkotaan Indonesia akibat krisis ekonomi berkepanjangan di negeri ini. Di samping itu, upaya pendidikan melalui keluarga juga semakin memprihatinkan akibat krisis ekonomi yang menyebabkan orang tua (baik ayah maupun ibu) harus bekerja lebih keras lagi dan menghabiskan waktu untuk pekerjaan dan uang guna mencukupi kebutuhan keluarga.

6. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

   Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang paling buruk di muka bumi. Mewabahnya berbagai bentuk *abuse of power* tersebut juga ditandai dengan tidak diperolehnya pelayanan yang adil dari penyelenggaran negara. Transparansi dalam pemakaian keuangan negara seringkali tidak bisa dipertanggungawabkan di hadapan publik. Kesadaran kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga belum terlalu tinggi, bahkan seringkali juga menghadapi represi dari rezim yang sedang berkuasa. Akses masyarakat terhadap informasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan juga banyak terhambat, yang pada akhirnya memberikan peluang praktek KKN. Penegakan hukum terhadap penjarah uang negara dan rakyat juga seringkali terabaikan dan cenderung tunduk pada kepentingan politik tertentu. Kenaikan tarif listrik, telepon, bahan bakar mesin, pelayanan air minum tanpa disertai pelayanan publik yang memuaskan merupakan fenomena ketidakadilan sosial atas masyarakat banyak. Pelayanan publik, seperti pelayanan KTP, SIM, STNK, ibadah haji, dan sebagainya, juga serigkali masih bersifat kolusif dan tidak transparan penggunaannya.

7. Kerusakan Sistem dan Kehidupan Ekonomi

   Kerusakan sistem ekonomi ditandai dengan merebaknya monopoli yang bersembunyi dengan istilah tata niaga, hilangnya kompetisi yang sehat dalam dunia usaha, dan ketertutupan dari tuntutan pasar bebas. Kebijakan makro

dan mikro ekonomi bangsa ini yang tidak mengacu pada persaingan yang sehat dan fair, keadilan serta pemerataan kesejahteraan bagi rakyat telah menimbulkan polarisasi sosial dan ketimpangan ekonomi yang besar. Membesarnya tingkat pengangguran terdidik dan kurang terdidik dan pemusatan kawasan pembangunan merupakan persoalan ekonomi bangsa ini yang belum selesai. Di samping persoalan struktural tersebut, persoalan kultural dan mental di kalangan masyarakat juga cukup besar menghambat kemajuan kehidupan ekonomi. Rendahnya indeks kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan masyarakat juga merupakan kendala pembangunan ekonomi, terutama bagi kalangan pribumi. Pola hidup konsumtif juga cukup menggejala di kalangan masyarakat.

8. Pelanggaran terhadap Nilai-nilai Kebangsaan

   Fenomena gerakan separatisme di Indonesia akhir-akhir ini cukup menggejala, seperti Aceh, Papua, dan Maluku. Banyak faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa ini, baik faktor ekonomi, politik, keamanan, maupun budaya. Keberagaman dalam satu bangsa (*bhinneka tunggal ika* atau *unity in diversity*) seakan mulai terkikis. Solidaritas kebangsaan seakan tersumbat oleh berbagai keterbatasan dan kentalnya kepentingan untuk memisahkan diri. Hampir satu juta orang saat ini hidup di wilayah-wilayah pengungsian, baik di Nusa Tenggara Timur, Aceh, Kalimantan, Maluku, Jawa Timur, dan beberapa belahan wilayah yang lain. Oleh karenanya, perlu ada upaya untuk reorientasi *nation building* untuk kembali merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam menjadi satu bangsa.

Setidaknya pula, dari delapan isu tersebut bisa dikembangkan menjadi bahan-bahan perenungan untuk mengembangkan pendidikan kewargaan sebagai berikut :

1. Pengembangan nilai-nilai demokratis, di antaranya meliputi keadilan, taat pada hukum (*rule of law*), kebebasan berpendapat dan berasosiasi , keterwakilan, dan *majority rules.*
2. Pengembangan kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic values and community values*), di antaranya meliputi perhargaaan atas hak-hak individual, *local needs,* dan *common good.*
3. Pengembangan pemerintahan yang bersih (*fair government*), di antaranya meliputi partisipasi, hak untuk mendapat pelayanan secara adil, *fairness, checks and balances.*
4. Pembentukan identitas nasional (*national identity*), di antaranya berupa reorientasi *nation building* dalam bentuk *bhinneka tunggal ika* (*unity in difference*), *independence,* kebanggaan nasional (*national pride*).
5. Pengembangan ikatan sosial (*social cohesion*) dan *diversity,* di antaranya meliputi toleransi (*tolerance*), keadilan sosial (*social justice*), dan *acceptance.*

6. Pengembangan kehidupan pribadi (*self-cultivation*) meliputi cenderung pada kebenaran (*truth*), tunduk pada hukum (*law-abiding*), jujur (*honesty*), kesopanan (*civility*), saling tolong menolong (*helping others*).
7. Pengembangan kehidupan ekonomi (*economic life*) di antaranya persaingan yang sehat *competition*, kesejahteraan wealth, pasar yang bebas (*free markets*).
8. Pengembangan nilai-nilai keluarga (*family values*), di antaranya rasa tanggung jawab (*respect*), dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), akhlak (*moral behavior*), kebersamaan (*togetherness*)

Tak lupa, sebagaimana telah disebutkan di muka buku ini tidak membahas pemupukan motivasi tentang kehidupan global. Rasa cinta untuk tinggal dan bekerja di negeri orang dewasa ini menjadi penting karena interaksi dan represi antar-bangsa memerlukan kemampuan sebuah bangsa memberi reaksi yang tepat. Lemahnya kemampuan *lobby* Indonesia disebabkan, antara lain, karena kurangnya komunitas Indonesia di negara-negara besar yang mampu memainkan peran sebagai kelompok penekan. Dalam konteks ini mungkin bisa ditambahkan bahwa pembahasan tentang karakter pribadi bisa dijabarkan dalam perspektif lokal maupun global. Buku tampaknya juga tidak membahas secara mendetail tentang karakter kepribadian bangsa yang sesuai dengan tuntutan era saat ini.